BAB. VI

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

OBJEKTIF:

- 1. Mahasiswa dapat memahami bagian dari pemungut pajak
- 2. Mahasiswa dapat mengetahui kegiatan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh 22
- 3. Mahasiswa dapat menjelaskan kegiatan terutang PPh 22
- 4. Mahasiswa dapat menjelaskan tata cara pemungutan dan penyetoran PPh 22
- 5. Mahasiswa dapat mengetahui sifat pemungutan PPh 22
- 6. Mahasiswa dapat menghitung dan mengisi PPh 22

6.1. Pemungut Pajak

Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan halhal berikut ini:

- 1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- 2. Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- 3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.010/2017, berikut ini daftar pemungut PPh Pasal 22:

- 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
- 2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang.
- 3. Bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persiapan (UP).

- 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 5. Badan usaha tertentu, meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil restrukturisasi oleh Pemerintah dan dilakukan melalui pengalihan saham milik negara ke BUMN lainnya;
 - c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah;
- 6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri.
- 7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (ATM), dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- 8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- 9. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
- 10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
- 11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.
- 12. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Di bawah ini daftar barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2015.

- a. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi.
- b. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya.
- c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
- e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
- f. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.

6.2 Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22

Objek (penghasilan yang dikenakan pajak) PPh Pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 (Objek PPh Pasal 22):

- 1. Impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikan Angka Pengenal Impor (API) bagi importirnya. Pengelompokan tersebut berpengaruh pada besarnya tarif (Lampiran PMK No. 110/PMK.10/2018).
- 2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
- 3. Pembelian barang oleh:
 - a. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga Negara lainnya;

- b. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan dengan pembelian barang kepada pihak ketiga melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 4. Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan-badan tertentu, yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquesfaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.
- 5. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi.
- 6. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importer umur kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat.
- 7. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- 8. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir.
- 9. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha.
- 10. Penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan.
- 11. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah.

6.3 Kegiatan yang Tidak dikenakan PPh Pasal 22

Berikut kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22:

- 1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, meliputi:
 - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, budaya, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - d. Barang untuk kepentingan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum:
 - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - h. Barang pindahan;
 - Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
 - j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk keperluan umum;
 - k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - Barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - m. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 - n. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, dan bukubuku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

- o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- r. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau
- s. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama;
- t. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- 3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
- 4. Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk

- keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 5. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak berkenaan dengan hal-hal berikut ini:
 - a. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut pajak ini meliputi Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut paiak ini meliputi badan usaha tertentu yang terdiri atas BUMN dan badan-badan tertentu yang dimiliki oleh BUMN.
 - c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos; pemakaian air dan listrik.
 - d. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari.
 - 1) Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama.
 - 2) Kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama.
 - 3) Trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama.
 - e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerjasama pengusahaan sumber daya panas bumi.
 - f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan yang dipecah-pecah.

- g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu (BUMN dan perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN).
- 6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
- 7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- 9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia.
- 10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

6.4 Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Saat terutangnya PPh Pasal 22, dibedakan sebagai berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh Pasal 22
1.	Impor barang	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan
		saat pembayaran Bea Masuk.
2.	Ekspor komoditas tambang	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan
	batubara, mineral, logam, dan	saat penyelesaian dokumen pemberitahuan
	mineral bukan logam.	pabean atas ekspor.
3.	Pembelian barang oleh Pemungut	Terutang dan dipungut pada saat
	Pajak (bendahara pemerintah dan	pembayaran kepada rekanan.
	KPA, bendahara pengeluaran,	
	KPA atau pejabat penerbit SPM).	
4.	Badan-badan tertentu yaitu	Terutang dan dipungut pada saat
	BUMN dan badan usaha tertentu	pembayaran kepada rekanan.
	yang dimiliki secara langsung oleh	

	BUMN (PT Pupuk Sriwidjaya	
	Palembang, PT Petrokimia Gresik,	
	PT Pupuk Kujang, PT Pupuk	
	Kalimantan Timur, dan lain-lain).	
5.	Penjualan hasil produksi usaha	Terutang dan dipungut pada saat
	industri semen, industri kertas,	penjualan.
	industri baja, industri otomotif,	
	industri farmasi.	
6.	Penjualan kendaraan bermotor	Terutang dan dipungut pada saat
	oleh ATPM, APM, dan importir	penjualan.
	kendaraan bermotor.	
7.	Penjualan bahan bakar minyak,	Terutang dan dipungut pada saat
	bahan bakar gas, dan pelumas.	penerbitan surat perintah pengeluaran
		barang (delivery order).
8.	Pembelian bahan-bahan hasil	Terutang dan dipungut pada saat
	kehutanan, perkebunan, pertanian,	pembelian.
	peternakan oleh badan industri.	
9.	Pembelian batubara, mineral,	Terutang dan dipungut pada saat
	logam, dari badan atau orang	pembelian.
	pribadi pemegang izin usaha	
	pertambangan.	
10.	Penjualan emas batangan oleh	Terutang dan dipungut pada saat
	badan usaha yang melakukan	penjualan.
	penjualan emas batangan di dalam	
	negeri.	
11.	Penjualan barang yang tergolong	Terutang dan dipungut pada saat
	sangat mewah.	penjualan.

6.5 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh dan dengan cara tertentu berdasarkan transaksi atau kegiatan sebagai berikut.

No.	Pemungutan	Penyetoran
1.	Pemungutan PPh Pasal 22 atas	PPh disetor oleh importir yang
	impor barang.	bersangkutan atau Ditjen Bea dan cukai
		melalui Pos Persepsi, Bank Divisa
		Persepsi atau Bank Persepsi menggunakan
		SSP Surat Setoran Pabean, Cukai dan
		Pajak (SSPCP) yang berfungsi sebagai
		bukti pemungutan pajak.
2.	Pemungutan PPh Pasal 22 atas	PPh disetor oleh eksportir yang
	ekspor komoditas tambang	bersangkutan melalui Pos Persepsi, Bank
	batubara, mineral logam, dan	Divisa Persepsi atau Bank Persepsi
	mineral bukan logam.	menggunakan SSP Surat Setoran Pabean,
		Cukai dan Pajak (SSPCP) yang berfungsi
		sebagai bukti pemungutan pajak.
3.	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh	Wajib disetor oleh pemungut ke Kas
	Pemungut Pajak (Bendahara	Negara melalui Pos Persepsi, bank
	Pemerintah, Kuasa Pengguna	Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh
	Anggaran (KPA), Bendahara	Menteri Keuangan menggunakan surat
	Pengeluaran, Pejabat Penerbit	setoran pajak.
	Surat Perintah Membayar atas	Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti
	delegasi KPA).	pemungutan pajak rangkap tigas (lembar
		pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua
		untuk KPP sebagai lampiran SPT, lembar
		ketiga sebagai arsip pemungut yang
		bersangkutan).
4.	PPh Pasal 22 oleh:	PPh wajib disetor oleh pemungut melalui
	a. Badan usaha tertentu meliputi	Pos Persepsi, Bank Divisa Persepsi atau
	BUMN dan badan usaha	Bank Persepsi menggunakan SSP.
	tertentu yang dimiliki secara	Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti
	langsung (PT Pupuk Sriwidjaja	Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap
	Palembang, PT Petrokimia	tiga
	Gresik, PT Pupuk Kujang, PT	

- Pupuk Kalimantan Timur, dan yang lain).
- Badan usaha industri tertentu (industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi).
- c. ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor.
- d. Produsen dan importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- e. Badan usaha industry atau
 eksportir yang membeli bahan
 berupa hasil kehutanan,
 perkebunan, pertanian,
 peternakan, perikanan.
- f. Badan usaha yang melakukan pembelian tambang batubara, dan lain-lain.
- g. Badan usaha yang menjual emas batangan di dalam negeri.

PPh Pasal 22 untuk setiap kegiatan dilaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan pelaporan PPh Pasal 22 atas impor barang dan ekspor komoditastambang batubara mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan selain impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara mineral logam dan mineral bukan logam lainnya dilakukan oleh Pemungut Pajak.

6.6 Sifat Pemungutan

Pemungutan PPh Pasal 22 dapat bersifat final atau tidak final. Pemungutan pajak bersifat final artinya pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu

tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh. Sebaliknya, pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang dipungut.

Setiap kegiatan yang dipungut PPh Pasal 22 bersifat tidak final. Khusus untuk PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas oleh produsen atau importir, pemungutan PPh Pasal 22 bersifat final untuk penyerahan kepada penyalur atau agen, sedangkan bersifat tidak final untuk penjualan kepada selain penyalur/agen.

6.7 Menghitung PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 dihitung dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu.

Tarif dan dasar pengenaan pajak untuk setiap kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif	Dasar Pengenaan	PPh Pasal 22
1.	Impor barang			
	a) Barang tertentu	10%	Nilai impor	10% x Nilai impor
	(Lampiran PMK			
	No.110/PMK.010/2018			
	huruf A); dengan atau			
	tanpa menggunakan			
	API.			
	b) Barang tertentu lainnya	7,5%	Nilai impor	7,5% x Nilai impor
	(Lampiran PMK			
	No.110/PMK.010/2018			
	huruf B); dengan atau			
	tanpa menggunakan			
	API.			

	c) barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf C); dengan menggunakan API. d) Barang selain pada	0,5%	Nilai impor	0,5% x Nilai impor
	huruf a, huruf b, dan huruf c; menggunakan API.	2,5%	Nilai impor	2,5% x Nilai impor
	e) Barang pada huruf c	7.50/	3. 711 · ·	7.50/ NUL:
	dan d; tidak	7,5%	Nilai impor	7,5% x Nilai impor
	menggunakan API. f) Barang yang tidak			
	dikuasai	7,5%	Harga jual lelang	7,5% x harga jual
	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	g j	lelang
2.	Ekspor ekspor komoditas	1,5%	Nilai ekspor	1,5% x Nilai ekspor
	tambang batubara, mineral			
	logam, dan mineral bukan			
	logam yang dilakukan oleh			
	eksportir, kecuali yang			
	dilakukan oleh Wajib			
	Pajak yang terikat dalam			
	perjanjian kerjasama			
	pengusahaan			
	pertambangan dan Kontrak			
	Karya (Lampiran PMK			
	No.110/PMK.010/2018			
	huruf D)			
3.	Pembelian barang oleh	1,5%	Harga pembelian tidak	1,5% x Harga
	Pemungut Pajak		termasuk PPN	pembelian
	(Bendahara Pemerintah,			
	Kuasa Pengguna Anggaran			

	(KPA), Bendahara			
	Pengeluaran, Pejabat			
	Penerbit Surat Perintah			
	Membayar atas delegasi			
	KPA).			
4.	Pembelian barang dan/atau	1,5%	Harga pembelian tidak	1,5% x Harga
	bahan-bahan untuk		termasuk PPN	pembelian (tidak
	keperluan kegiatan oleh			termasuk PPN)
	Badan usaha tertentu			
	meliputi BUMN dan badan			
	usaha tertentu yang			
	dimiliki secara langsung			
	(PT Pupuk Sriwidjaja			
	Palembang, dan yang lain).			
5.	Penjualan hasil			
	produksi/impor bahan			
	bakar minyak, gas, dan			
	pelumas oleh produsen			
	atau importir:			
	a) Penjualan bahan bakar	0,25%	Nilai penjualan tidak	0,25% x nilai
	minyak kepada SPBU		termasuk PPN	penjualan (tidak
	(yang dibeli dari			termasuk PPN)
	Pertamina atau anak			
	perusahaan Pertamina)			
	b) Penjualan bahan bakar			
	minyak kepada SPBU	0,3%	Nilai penjualan tidak	0,3% x nilai
	(yang dibeli selain dari		termasuk PPN	penjualan (tidak
	Pertamina atau anak			termasuk PPN)
	perusahaan Pertamina)			
	c) Penjualan bahan bakar			
	minyak kepada selain			
	a) dan b)	0,3%	Nilai penjualan tidak	
			termasuk PPN	

	d) Penjualan bahan bakar			0,3% x nilai
	gas	0,3%	Nilai penjualan tidak	penjualan (tidak
			termasuk PPN	termasuk PPN)
	e) Penjualan pelumas			0,3% x nilai
		0,3%	Nilai penjualan tidak	penjualan (tidak
			termasuk PPN	termasuk PPN)
				0,3% x nilai
				penjualan (tidak
				termasuk PPN)
6.	Penjualan hasil produksi			
	kepada distributor di			
	dalam negeri oleh badan			
	usaha yang bergerak di			
	dalam bidang:			
	a) Industri semen	0,25%	Dasar pengenaan PPN	0,25% x Dasar
	(penjualan semua jenis			pengenaan PPN
	semen)			
	b) Industri kertas	0,1%	Dasar pengenaan PPN	0,1% x Dasar
				pengenaan PPN
	c) Industri baja (penjualan	0,3%	Dasar pengenaan PPN	0,3% x Dasar
	baja)			pengenaan PPN
	d) Industri otomotif	0,45%	Dasar pengenaan PPN	0,4% x Dasar
	(penjualan semua jenis			pengenaan PPN
	kendaraan bermotor,			
	beroda dua atau lebih,			
	tidak termasuk alat			
	berat)			
	e) Industri farmasi	0,3%	Dasar pengenaan PPN	0,3% x Dasar
	(penjualan semua jenis			pengenaan PPN
	obat)			
7.	Penjualan kendaraan	0,45%	Dasar pengenaan PPN	0,45% x Dasar
	bermotor di dalam negeri			pengenaan PPN
	oleh ATMPM, APM, dan			

	importir umum kendaraan			
	bermotor, tidak termasuk			
	alat berat.			
8.	Pembelian bahan-bahan	0,25%	Harga pembelian tidak	0,25% x Harga
	hasil kehutanan,		termasuk PPN	pembelian tidak
	perkebunan, pertanian,			termasuk PPN
	peternakan, dan perikanan			
	yang belum melalui proses			
	industri manufaktur oleh			
	badan usaha industri.			
9.	Pembelian batubara,	1,5%	Harga pembelian tidak	1,5% x Harga
	mineral logam, dari badan		termasuk PPN	pembelian tidak
	atau orang pribadi			termasuk PPN
	pemegang izin usaha			
	pertambangan.			
10.	Penjualan emas batangan	0,45%	Harga jual emas	0,45% x harga jual
	oleh badan usaha yang		batangan	
	melakukan penjualan emas			
	batangan di dalam negeri.			
11.	Penjualan barang	5%	Harga barang	5% x harga barang
	tergolong sangat mewah			
	oleh Wajib Pajak yang			
	melakukan penjualan			

Keterangan:

a) Nilai impor: nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk, yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Cost merupakan harga faktur; insurance merupakan biaya asuransi antar-daerah pabean, Freight merupakan biaya angkut (pendapatan) antar daerah pabean.

b) Nilai ekspor adalah nilai Free on Board (FoB).

c) Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN): dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual.

Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut.

- Jika harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan.
- 2. Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110.

DPP PPN =
$$(100 \div 110)$$
 x Harga pembelian/penjualan

3. Jika harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPnBM.

$$DPP\ PPN = \{100 \div (110 + tarif\ PPnBM)\}\ x\ Harga\ pembelian/penjualan$$

Jika tarif PPnBM sebesar 20%,

$$DPP\ PPN = \{100 \div (110 + 20)\}\ x\ Harga\ pembelian/penjualan$$

$$DPP\ PPN = (100 \div 130)\ x\ Harga\ pembelian/penjualan$$

d) Besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila Wajib Pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini berlaku untuk pemungutan **PPh Pasal 22** yang bersifat tidak final.

6.8 Contoh Penghitungan

Contoh 1.a

PT Anda adalah importir telah memiliki API. Pada Desember 2018, melakukan impor barang (pakaian selam) dari Jepang dengan harga faktur USD100.000. biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Anda. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah Pabean adalah Rp10.000.000. kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah USD1 = Rp14.500, sedangkan kurs BI adalah USD1 = 14.540. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda.

PPh Pasal 22 dihitung sebagai berikut.

1. Menghitung nilai impor

- Harga faktur (cost)	USD100.000
- Biaya asuransi (insurance): 0,5% x USD100.000	USD 500
- Biaya angkut (freight): 10% x USD100.000	USD 10.000 (+)
CIF (cost, insurance, freight)	USD 110.500
Bea masuk: 10% x USD110.500	USD 11.050 (+)
Nilai impor	USD 121.550
Nilai impor (dalam rupiah): USD121.550 x Rp14.500	Rp 1.762.475.000
Pungutan lain yang sah di daerah pabean	Rp. 10.000.000 (+)
Nilai Impor (NI)	Rp 1.772.475.000

2. Menghitung PPh Pasal 22 – Impor

Besarnya PPh Pasal 22 adalah:

10% x Rp1.772.475.000

Rp 177.247.500

*) Pakaian selam termasuk kelompok barang impor tertentu dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 10% (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf A), dengan atau tanpa menggunakan API.

Contoh 1.b

PT Bunda tidak menggunakan API. Pada Desember 2018, melakukan impor barang (tas olahraga) dari Negara X dengan harga faktur USD100.000. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Negara X ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 2% dan 6% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Bunda. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 10% dan 20% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah Pabean adalah Rp10.000.000 Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah USD1 = Rp14.500, sedangkan kurs BI adalah USD1 = Rp14.540. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Bunda.

1. Menghitung nilai impor

- Harga faktur (cost)	USD 1	100.000
- Biaya asuransi (insurance): 2% x USD100.000	USD	2.000
- Biaya angkut (freight): 6% x USD100.000	USD	6.000 (+)
CIF (cost, insurance, freight)	USD 1	108.000
Bea masuk: 10% x USD110.500	USD	11.050

 Bea masuk tambahan: 20% x USD108.000
 USD 21.600 (+)

 Nilai impor
 USD 140.400
 USD 140.400

 Nilai impor (dalam rupiah): USD140.400 x Rp14.500
 Rp 2.035.800.000
 Rp. 10.000.000 (+)

 Nilai Impor (NI)
 Rp 2.045.800.000

2. Menghitung PPh Pasal 22 – Impor

7,5% x Rp2.045.800.000

Rp. 153.435.000

*) Tas olahraga termasuk kelompok barang impor tertentu dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 7,5% (Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf B), dengan atau tanpa menggunakan API.

6.9 Surat Pemberitahuan Masa dan Bukti Pemungutan

Bagian ini akan membahas contoh pengisian SPT dan bukti pemotongan PPh Pasal 22 UU PPh. Contoh kasus berikut dibedakan menjadi dua, yaitu Pemotong/Pemungut PPh Pasal 22 menyampaikan SPT Masa yang dilengkapi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan Pemotong/Pemungut PPh Pasal 22 menyampaikan SPT Masa yang dilengkapi dengan SSP.

Kasus 1

PT Kertasindo adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memproduksi kertas. Perusahaan ini didirikan tahun 2005 dan beralamat Jl. Diponegoro No.28, Semarang. Nomor NPWP-nya 01.999.888.7.508.000. Berikut adalah transaksi penjualan hasil industry oleh PT Kertasindo kepada beberapa distributornya selama November 2016.

- 02 November: PT Kertasindo menjual hasil industri kepada CV Indah senilai Rp110.000.000 (termasuk PPN 10%). CV Indah beralamat di Jl. Alamanda No.12 Semarang. NPWP-nya 01.333.111.4.508.000.
- 14 November: PT Kertasindo menjual hasil industri kepada Noval Pratama senilai Rp165.000.000 (termasuk PPN 10%). Noval Pratama beralamat di Jl. Elang No.10 Magelang. NPWP-nya 68.111.222.3.524.000.
- 20 November: PT Kertasindo menjual hasil industri kepada UD Jaya Terus senilai Rp825.000.000 (termasuk PPN 10%). UD Jaya Terus beralamat di Jl. Kotalama No.14 Yogyakarta. NPWP-nya 01.555.333.6.541.000.

Diminta:

- Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut pada saat penjualan hasil industry kertas.
- Buatkan bukti pemungutan PPh Pasal 22.
- Setorkan hasil pemungutan PPh tersebut dengan menggunakan SSP.
- Laporkan hasil pemungutan PPh tersebut menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22.

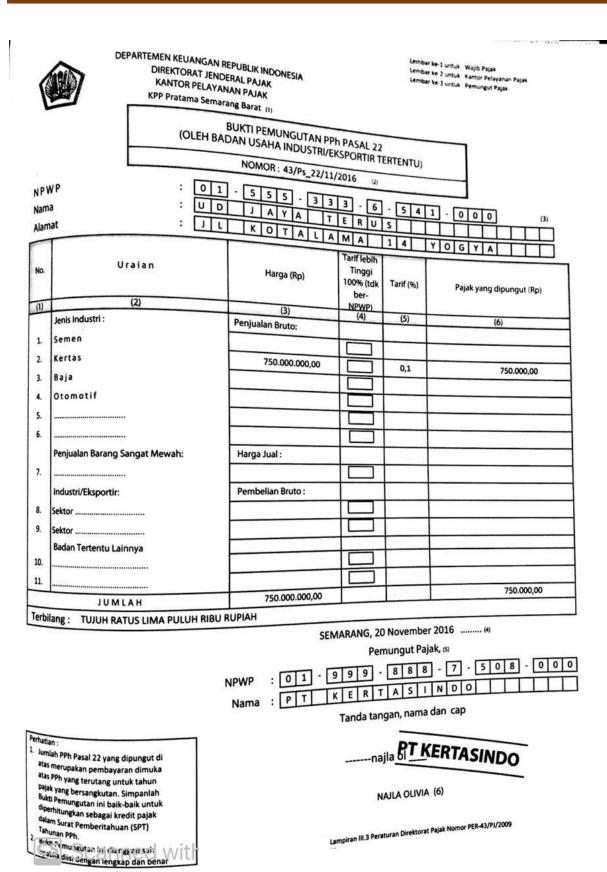
Penyelesaian

Nama Pembeli	Dasar Pengenaan Pajak	PPh yang Dipungut
CV Indah	(100 ÷ 110) x Rp110.000.000 = Rp100.000.000	0,1% x Rp100.000.000 = Rp. 100.000
Noval Pratama	(100 ÷ 110) x Rp165.000.000 = Rp150.000.000	0,1% x Rp150.000.000 = Rp. 150.000
UD Jaya Terus	(100 ÷ 110) x Rp825.000.000 = Rp750.000.000	0,1% x Rp750.000.000 = Rp. 750.000
	Total	Rp 1.000.000

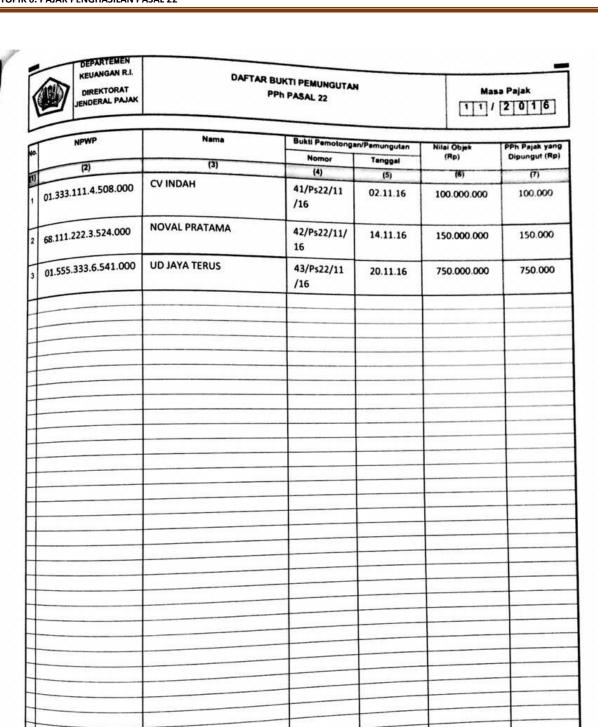
		-			
	DEPARTEMEN KEUANGAN REI DIREKTORAT JENDER KANTOR PELAYANA KPP Pratama Semarar	AL PAJAK		cemba	r ke-1 untuk : Wajib Pajak r ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak r ke-3 untuk : Pemungut Pajak
	(OLEH BAD	UKTI PEMUNGUTAN PPH AN USAHA INDUSTRI/EK	PASAL 22		
		NOMOR: 41/Ps_22/11/2	SPORTIR TI	ERTENTU)	
0	: 01		2016 (2)		
NPWP	: [[]	1111	1 - 4	- 50	8 - 0 0 0 (3)
Nama	: 171	TA DA H			
Alamat		ALAMAN	DA	1 2	SEMARANG
No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif lebih Tinggi 100% (tdk ber-	Tarif (%)	Pajak yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	NPWP)	(5)	
1	enis Industri :	Penjualan Bruto:	(4)	(5)	(6)
1. 5	emen				
2. K	ertas	100.000.000,00		0,1	100.000,00
3. B	aja		t =		
4. 0	tomotif				
5					
			一		
	Penjualan Barang Sangat Mewah:	Harga Jual :	+	-	
- 1	enjudian barang sangat mewan.	Tranga Jauri			
0.000	ndustri/Eksportir:	Pembelian Bruto :			
	ektor				
9. S	ektor				
E	Badan Tertentu Lainnya		1	-	
10			+==		
11		100.000.000,00	+	-	100.000,00
	JUMLAH	100.000.000,00			
Terbila	ng: SERATUS RIBU RUPIAH		Manager 1		DED 2016 //
		SEM	MARANG,	2 NOVEME	BER 2016 (4)
			Pe	emungut Pa	ajak, isi
		N	K E R	T A S	8 - 7 - 5 0 8 - 0 0 0
		Indilia .	Tanda ta	ngan, nam	a dan cap
David			**************	NO. TENS. (19)	
	h PPh Pasal 22 yang dipungut di		r	ајіа 01	PT KERTASINDO
Bukti diperi	Ph yang terutang untuk tahun yang bersangkutan. Simpanlah Pemungutan ini baik-baik untuk hitungkan sebagai kredit pajak			NAJLA OLIV	IA (6)
Tahur 2. Bukti	n Surat Pemberitahuan (SPT) nan pph. Pemungutan ini dianggap sah la diisi dengan lengkap dan benar		Lampiran III.3 Pi	_{er} aturan Direkto	orat Pajak Nomor PER-43/P1/2009

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak

,	MARIO MA	N KEUANGAN EKTORAT JEN NTOR PELAY Pratama Sem	IDERA ANAN	L PAJAK PAJAK		ESIA														
			BU	KTI PEN	NUN	IGUT	AN	PP	h PA	SAL 2	2									
		(OLEH B	ADA	N USAF	IA IN	NDU	STRI	/EI	(SPC	ORTIR		ILEN	VIU,)		-				
				NOMOR	₹: 4.	2/Ps	_22/	11/	2010	5 (2)	_	_	_	_	_	_				
NP	WP	: 6	8 -	1 1	1] - [2	2	2	- 3	<u>] -</u>	_ 5	2	4]	0	0	0		
Nan	ma	: N C	V	AL		Р	R	A	Т	A M	A						\perp	Ī	1	Ø
Ala	mat	: 11	I	EL	A	N	G		1	0	М	Α	G	E	L	A	N	G	*	Ħ
			T							if lebih	700	-	e) team	Т					_	$\overline{1}$
No.	Uraian			Ha	rga ((Rp)			100	inggi % (tdk per-	1	arif ((%)			Pajak	yanç	g dipu	Ingut (R	
(1)	(2)		+-		(3)		-	4		(4)	-	(5)		\vdash	_			-		- 1
(1)	Jenis Industri :		Per	njualan l	_):		1	-	(4)		(3)		\vdash	_		_	(6)		
1.	Semen						_	7	Т	\neg	\vdash			\vdash			-	_		
2.	Kertas		\vdash	150	.000.	.000		+	一	=	\vdash	0,1		\vdash			_	15		
3.	Baja		\vdash					7	十	=	\vdash	-	100				_	150	0.000	
4.	Otomotif				_		_	+	〒	=	\vdash							_		
5.						_		+	ᅮ	=	-	_		-	_		_			
6.					-			+	卜	=	_	_	_	\vdash	_	-		_		
	Penjualan Barang Sangat Mewa	h:	Hai	rga Jual	:		× 2.10	†	-					_	_	11117	O. The			_
7.	Industri/Flore esti-							I							_			-		\dashv
8.	Industri/Eksportir: Sektor		Per	nbelian	Brute	0:	ANCE	7	_			337	-17					-		\dashv
9.	Sektor		_			_		+	누	_										
	Badan Tertentu Lainnya		-					+	느											
10.	······································						_	+			-	_	-	_	_					
11.			1 50					+	늗	╡┤	_		\dashv	_	_			_		_
_	JUMLAH			150.0	0.00	000		+	_	-4			-							\dashv
Terbil	ang : SERATUS LIMA PULUH RI	BU RUPIAH						1	-	- 1		-	- 9					150	0.000	
		N	PWP	:[0	1] -	SEM	_	RAN	G, 14 Pem	NOV ung	VEN gut I	ABEI Paja	R 20 ik, (5)	16			8	1 - 0	00
		j	Nama	a : [P ·	ī	K	Ī	F	1	A	S	1	N	=	0	I			
erhatian Jumlah atas m	: h PPh Pasal 22 yang dipungut di erupakan pembayaran dimuka	7						Ta	nda	tanga	an,	nan	na d	lan	сар	•				
pajak y Bukti Pe diperhit	h yang teruhayaran dimuka Phyang teruhang untuk tahun ang bersangkutan. Simpanlah emungutan ini balik-balik untuk tungkan sebagai kredit pajak uurat Pemberitahuan (SPT)									-najla	P	T	KE	R	TA	SIN	ND	00	•	
Tahunar Bukti Pe	n PPh. n PPh. mungutan ini dianggap sah diisi dengan lengkap dan benar						12293111			NAJ										
							Lam	pira	n III.3	Peratura	an Dia	raktor	ent Da	tal. M.		DED 43/	/D1/7(109		



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : 0 1 9 9 9 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : PT KERTASINDO ALAMAT WP : JL. DIPONEGORO NO.	[8]8		SCHOOL STANDARD CONTROL OF THE	LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP									
NOP : Dilsi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP :		J											
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran	Ura	Uraian Pembayaran :											
4 1 1 1 2 2 1 0 0	SET	ORAN PPH PAS	AL 22 ATAS PEN	JUALAN HASIL INDUSTRI									
Masa Paja	k												
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Ju	1	Sep Okt	X X	Tahun Pajak									
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai denga	n pembayarar	untuk masa yang	berkenaan	Diisi Tahun terutangnya Paja									
Nomor Ketetapan : LIIIII	/	/	/	/									
Jumlah Pembayaran : Rp 1.000.000,00 Terbilang : SATU JUTA RUPIAH				Diisi dengan rupiah penuh									
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayara Tanggal Cap dan tanda tangan	an		SEMARANG , Cap dar	ajak/Penyetor 10 DESEMBER 2016 n tanda tangan									
Nama Jelas :		Nama	Jelas: NAII	A OLIVIA									
" Terima kasih Telah Mem Ruang Valid F.2.0.32.01	bayar Pajak dasi Kantor	- Pajak Untuk P Penerima Pemb		angsa "									



PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK	fanda Tangan & Cap
NAJLAOLIVIA NAJLAOLIVIA NP 0 4 1 3 3 4 5 6 1 - 5 0 8 0 0 0	==najla ol
	Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/P-Ji

JUMLAH

1.000.000

1.000.000.000

	DES	ARTE	EMEN	Т	_								HUAN									N L	SP	T Nor T Per	mh.	
	KEU	ANGA	W R.I.	Γ	_ F	ormi	ulir ir	ni c	_		1.701		mela silan P	oorka	n	Per	nungu	utai	n			1	1			ak 1
					_	_		_	_	_	_										_			7A		
BAGIAN A. IDE	NTITAS	PEM	IUNG	UT P	AJ/	K/		=	-	=	T	7	. [5 0	I	8		0	0	0						_
1. NPWP	: 0			9 9	-	-	+	#	$\overline{}$	*	十	o	0		Ι	I		1	200						T	7
	. P	T		K E		RT		4	+	_	-	R	0	N	I	0	. 2	2	8		s	E	M	A	R	+
2. Nama	. 3	-		0 1		P 0	N	Щ	E	GT.	_				_										-	
3. Alamat												_	-	NI	[a]	Ob	jek P	ala	ak	-	-	-		PDL		
AGIAN B. OB.	JEK PA	JAK	_	_	_	_				KA	P/K	(JS					(Rp							PPhy	yan	g Dip
		Ura	ian			_		_	+	_	(2	1	COTH 656	nusci Garage	idi		(3)						460	ulaina		(4)
		(_	_	_	-	+	411			0	1	1.0	000	.000	.00	0,00	00				1.00	0.0	00 00
1. Badan Usa	ha Indu	stri/El	ksport	ir			lews	ah		411															-	3,00
1 -1 1	Darana V	vano 1	tergoli	ong :	san	gat N	den	ari						courter.			-									-
3. Pembelian	Barang	Oleh	Bend	ahar	awa	n/Ba	udii			411	122	/10	٥٢													-
Todantu Ya	ana Ditu	njuk								1000				Name of	-	e de la constante de la consta	- Contractor	mi.	-	-	September 1	Carlotte Market	-		-	-
4. Nilai Impor	Bank De	evisa/	Ditien	Bea	oa	ii Cu	KOI /	,	-	411	122	/10	。厂													
a. API	Es.									4111			_													
b. Non API		Per	den (Cukai	()					4111	122	/10	o [
5. Hasil Lelan 6. Penjualan N	g (Ditjen	leb D	uall (metre	ina /	Bad	lan U	Jsah	а					00	- Helli		1	HI PATERIO	*****	1940	46.00	Carl.	CPT OF L	-	19.0	- Cert	
		en P	en callil					95					E.	electric to	and the	dia.		200	-				Laster		n dia	
Selain Perta a. SPBU/A		valur	(Fina	ıl)						4111	122	/40	1													
b. Pihak lai										4111	22	1100	· _		_	_							1			
D. FILIAN IA	III LI IVUIN									411	22	/10	ויי													
										7.11	221	710	<u>'</u> -												_	
7		JUM	LAH								22	100		1	1.0	000.	.000	.00	0,0	00				1.000	0.00	00,00
7Terbilang: S	ATU JI	JUMI	LAH								22	710		1	1.0	000.	000.	.00	0,0	00				1.00(0.00	00,00
7. Terbilang: S *) Coret yang tidak AGIAN C. LAN	ATU JI	JUM	LAH RUP	IAH						e opur																
Terbilang: S 7) Coret yang tidak AGIAN C. LAN 1. Daftar Pertan	ATU JU APIRAN Surat Sunina/Bad	JUMI UTA etorar	RUP n Paja	IAH ak PP selai	Ph P	Pasal ertam	22 (i	(Kh		s unto	uk E	Ban	ak Dev	isa, E	Bei	ndal	harav	var	n/Ba		n T	erten	ntu Ya	ang D		
7	ATU JU APIRAN Surat Sonina/Bad Setoran ius untuk	JUMI UTA etorar dan U	RUP n Paja	IAH ak PP selai	Ph Pin Peng d	Pasal ertam diseto dahar	22 (Inina) or ole rawa	(Kh). eh i	impo Bada	s unti	uk E	Ban I Pe	ak Dev	isa, E Bara Ditur	Bei	ndal set	harav	var	1/Ba	ada			ntu Ya	ang Di	itun	juk da
7 Terbilang: S 7) Coret yang tidak AGIAN C. LAN 1. Daftar Pertan 2. Surat S (Khusu 3. SSP ya	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran us untuk ang dise	JUMI UTA etorar dan U Pajak Bank	RUP n Paja saha	IAH ak PP selaii P) yar sa, B	Ph Prin Peng d	Pasal ertam diseto dahar Pajal	22 (Inina) or ole rawa k set	(Kh). eh i	impo Bada nyak	s unto	uk E	Ban I Pe	ak Dev	isa, E Bara Ditur	3ei ing	ndal set	harav banya an Pe	var	1/Ba	ada			ntu Ya	ang Di	itun	juk da
7	ATU JU APIRAN Surat Se nina/Bad Setoran i us untuk ang dise us untuk	JUMI UTA etorar dan U Pajak Bank etor ole Bada	RUP n Paja saha : (SSF c Devi	IAH selai y) yar sa, B	Ph Pin Penng di	Pasal ertam diseto dahar Pajal estri/E	22 (Inina) or ole rawa k set	(Kh). eh i an/l bar	impo Bada nyak ir Te	s untir ortir a an Te	uk E	Ban I Pe	ak Devembeli Yang	isa, E Bara Ditur Iem	Bei ing nju	ndal) seb k da ar ukai	harav banya an Pe	war ak:	n/Ba	ada	Bad	an U	lem saha	ang Di bar Selai	itun	juk da
Terbilang: S 7) Coret yang tidak AGIAN C. LAN 1. Daftar Pertam 2. Surat S (Khusu 3. SSP ya (Khusu 4. X Daftar	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran us untuk ang dise us untuk Bukti Pe	JUMA etorar dan U Pajak Bank tor ole Bada	RUP n Paja saha : (SSF c Devi	IAH k PP selaii P) yar sa, B munq	Ph Pin Peng di Bendigut I	Pasal ertam diseto dahar Pajal stri/E	22 (Inina) or ole rawa k set Ekspo	(Kh). eh i an/l bar orti	impo Bada nyak ir Te	s unti	uk E	Ban I Pe Intu	ak Devembeli Yang en Bean Usah	Bara Ditur Iem dan	Bei ing nju nba Ci	ndal) set ik da ar ukai	harav banya an Pe	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada ntu c	an U	ntu Ya] lem saha Ditjen	ang Di bar Selai	in P	juk da ertam Cuka
Terbilang: S ") Coret yang tidak AGIAN C. LAN 1. Daftar Pertan 2. Surat S (Khusu (Khusu 3. X Daftar I	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran i us untuk ang dise us untuk Bukti Pe	JUMI UTA etorar dan U Pajak Bank tor ok Bada	RUP Paja saha ((SSF CDevi eh Pe an Usa	IAH k PP selaii yar sa, B mung aha li PPh	Ph Pin Peng di Bendugut I Indus Pas	Pasal dahar Pajal stri/E Sal 22	22 (Inina) or ole rawa k set Ekspo 2 (Kh	(Kh). eh i an/l bar orti	impo Bada nyak ir Te sus u	s unti	uk E	Ban I Pe Intu Ditje	ak Devembeli Yang an Bea	Bara Ditur I lem I dan na Inc	Bei ing nju nba Ci du	ndal) set ik da ar ukai stri/l	harav banya an Pe	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada ntu c	an U	ntu Ya] lem saha Ditjen	ang Di bar Selai	in P	juk da ertam Cuka
Terbilang: S Terbilang: S Coret yang tidak AGIAN C. LAN Daftar Pertam Surat S (Khusu Khusu	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran lus untuk ang dise us untuk Bukti Pe	JUMI UTA etorar dan U Pajak Bank ttor ole Bada emung utan P	RUP n Paja saha s saha s s (SSF Devi eh Pe an Usa gutan PPh Pa	IAH k PP selaii y) yar sa, B munq aha li PPh asal ; an re	Ph Penn Penng di Bendum Passendo Passen	Pasal ertam diseto dahar Pajal stri/E ssal 22 Khus penju	22 (Inina) or ole rawa k set Ekspo 2 (Kh	(Kh). eh i bar/i bar orti hus	impo Bada nyak ir Te sus u uk B	s unti	uk E	Ban I Pe Intu Ditje	ak Devembeli Yang an Bea	Bara Ditur I lem I dan na Inc	Bei ing nju nba Ci du	ndal) set ik da ar ukai stri/l	harav banya an Pe	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada ntu c	an U	ntu Ya] lem saha Ditjen	ang Di bar Selai	in P	juk da ertam Cuka
Terbilang: S 7 Coret yang tidak AGIAN C. LAN 1. Daftar Pertan 2. Surat S (Khusu Khusu	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran i is untuk ang dise is untuk Bukti Pe Pemungu rincian p	JUMI UTA dan U Pajak Bank tor ole Bada emunç utan P	RUP n Paja saha ((SSF k Devi eh Pe an Usa gutan PPh Pa	IAH k PP selaii y) yar sa, B munq aha li PPh asal ; an re	Ph Penn Penng di Bendum Passendo Passen	Pasal ertam diseto dahar Pajal stri/E ssal 22 Khus penju	22 (Inina) or ole rawa k set Ekspo 2 (Kh	(Kh). eh i bar/i bar orti hus	impo Bada nyak ir Te sus u uk B	s unti	uk E	Ban I Pe Intu Ditje	ak Devembeli Yang an Bea	Bara Ditur I lem I dan na Inc	Bei ing nju nba Ci du	ndal) set ik da ar ukai stri/l	harav banya an Pe	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada ntu c	an U	ntu Ya] lem saha Ditjen	ang Di bar Selai	in P	juk da ertam Cuka
Terbilang: S Toroit yang tidak AGAN C. LAN Daftar Pertam Surat S (Khusu Khusu Kh	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran Jus untuk ang dise Jus untuk Bukti Pe Pemungu rincian p	JUMI UTA etorar dan U Pajak Bank Bank ttor old Bada emung utan P	RUP n Paja saha : ((SSF k Devi eh Pe an Usa gutan Ph Pa alalan d m hal	IAH k PP selaii y) yar sa, B munq aha li PPh asal ; an re	Ph Pein Pein Pein Pein Pein Pein Pein Pein	Pasal ertam diseto dahar Pajal stri/E sal 22 Khus penju	22 (Inina) pr ole rawa k set Ekspo 2 (Kh sus u ualar	(Kh). eh i bar/i bar orti hus	impo Bada nyak ir Te sus u uk B	s unti	uk E	Ban I Pe Intu Ditje	ak Devembeli Yang an Bea	Bara Ditur I lem I dan na Inc	Bei ing nju nba Ci du	ndal) set ik da ar ukai stri/l	harav banya an Pe	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada ntu c	an U	ntu Ya] lem saha Ditjen	ang Di bar Selai	in P	juk da ertam Cuka
Terbilang: S Terbilang: S Coret yang tidak AGIAN C. LAN Daftar Pertam Surat S (Khusu Khusu Daftar Risalah Surat K	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran Jus untuk ang dise Jus untuk Bukti Pe Pemungu rincian p In lelang (Kuasa Ki	JUMI UTA etorardan U Pajak Bank ttor old Bada emunç utan P enjua	RUP RUP n Paja saha : ((SSF k Devi eh Pe enn Usa gutan PPh Pa allan d m hal	IAH k PP selaii sa, B munq aha li PPh asal; an re	Ph Pin Peng di Bendusian Passe 22 (industrial ksarrian ks	Pasal ertam dahar Pajal stri/E Khus penju	22 (Inina) pr ole rawa k set Ekspo 2 (Kh sus u ualar	(Kh). eh i bar/l bar orti hus unt n (d	impo Bada nyak ir Te sus u uk B dalai	s untir aan Te :: rtenti untuk aadar m ha	uk E etau erter Lu, C a Ba n Us	Ban I Pe Intu Ditje adar sah	nmbeli Yang Yang n Usal a Indu	Bara Ditur I lem dan na Inc sstri/E	Bei ing nju nba Ci du Eks	ndal) set k da ar ukai stri/i sspor	harav banya an Pe i). Impor	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada ntu c	an U	ntu Ya] lem saha Ditjen	ang Di bar Selai	in P	juk da ertam Cuka
Terbilang: S Terbilang: S Coret yang tidak AGIAN C. LAN Daftar Pertam Surat S (Khusu Khusu Khusu Risalah Surat K GIAN D. PERI Pengan menyad	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran Jus untuk ang dise Jus untuk Bukti Pe Jemungu rincian p a lelang suratak Setoran Justina suratak Justina suratak Setoran Justina suratak Justina suratak Justina suratak Setoran Justina suratak Justina suratak Justina suratak Setoran Justina suratak Justina surata	JUMI UTA etorar dan U Pajak Bank tor ok Bada mung utan P penjua	RUP RUP n Paja saha : ((SSF k Devi eh Pe enn Usa gutan PPh Pa alan d m hal	IAH k PP selaii sa, B munq aha li PPh asal ; an re	Ph Pin Peng di Bendu Pas 22 (letur ksar	Pasal ertam diseto dahar Pajal sstri/E sal 22 Khus penju naan	22 (Inina) pr ole rawa k set Ekspo 2 (Kh sus u ualar lelai	(Kh). eh i bar orti hus unt n (d	impo Bada nyak ir Te sus u uk B dalai	s unti ortir a aan Te :: rtenti untuk adar m ha	uk E stau terter Uu, D a Ba	Ban I Pe Intu Ditje adar sah	nmbeli Yang n Usal a Indu	Bara, E Bara Ditur I dan dan na Ind sstri/E	Bei ing nju nba Ci du Eks	ndal) set k da ar ukai stri/l spor	harav banya an Pe i). Impor	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada ntu c	an U	lem saha Ditjen Bea	bar Selai Bea	itun in P	juk da ertam Cuka
Terbilang: S Terbilang: S Coret yang tidak AGIAN C. LAM Daftar Pertan Surat S (Khusu Khusu Khusu Risalah Surat K AGIAN D. PERI Pengan menyad	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran i as untuk ang dise as untuk Bukti Pe emungu rincian p a lelang i (uasa Ki	JUMI UTA etorar dan U Pajak Bank tor ole Bada mung utan P penjua (dalar	LAH RUP n Pajaja saha a ((SSP k Devi eh Pe an Usa gutan PPh Pa alalan d mm hal 3.	k PP selai) yar sa, B munq aha li PPh asal ? an re	Ph Pen	Pasal ertam diseto dahar Pajal sstri/E Sal 22 Khus penju naan	22 (Inina) pr ole rawa k set Ekspo 2 (Kh sus u ualar Ielan	(Kh). eh i bar orti hus unt unt in (c	impo Bada nyak ir Te sus u k B dalai	s untir a an Te :: rtenti untuk adar m ha	uk E stau u, D s s Ban Us k sa	Ban Pentu Ditje adar sah	ak Devenbeli Yang n Usal a Indu	Bara Ditur I lem I dan na Inc stri/E	Bei ing nju nba Ci du Eks	ndal) set k da ar ukai stri/l spor	harav banya an Pe i). Impor	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada htu c	an U	lem saha Ditjen Bea	bar Selai Bea	itun in P dan cuka	juk da ertam Cuka
Terbilang: S 7) Coret yang tidak AGIAN C. LAN 1. Daftar Pertan 2. Surat S (Khusu 3. SSP ya (Khusu 4. X Daftar 5. X Bukti P 6. X Bukti P 6. X Bukti P 6. X Surat K AGIAN D. PERI engan menyad etentuan perunaritahukan di at	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran Jus untuk ang dise Jus untuk Bukti Pe Jus untuk B	JUM UTA etorar dan U Pajak Bank ttor old Bada emung (dalar husus	LAH RUP n Paja saha : ((SSF C Devi eh Pe an Usa alan d m hal s.	k PP selaii ') yar sa, 8 mung aha li PPh asal : an re pelal	Ph Pen	Pasal ertam diseto dahar Pajal sstri/E Sal 22 Khus penju naan	22 (Inina) pr ole rawa k set Ekspo 2 (Kh sus u ualar Ielan	(Kh). eh i bar orti hus unt unt in (c	impo Bada nyak ir Te sus u k B dalai	s untir a an Te :: rtenti untuk adar m ha	uk E stau u, D s s Ban Us k sa	Ban Pentu Ditje adar sah	ak Devenbeli Yang n Usal a Indu	Bara Ditur I lem I dan na Inc stri/E	Bei ing nju nba Ci du Eks	ndal) set k da ar ukai stri/l spor	harav banya an Pe i). Impor	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada htu c	an U	lemsaha Ditjen Bea	Bea dan C	in P	juk da ertam Cuka ii).
Terbilang: S 7) Coret yang tidak AGIAN C. LAN 1. Daftar Pertan 2. Surat S (Khusu 3. SSP ya (Khusu 4. X Daftar 5. X Bukti P 6. X Bukti P 6. X Bukti P 6. X Surat K AGIAN D. PERI engan menyad etentuan perunaritahukan di at	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran Jus untuk ang dise Jus untuk Bukti Pe Jus untuk B	JUM UTA etorar dan U Pajak Bank ttor old Bada emung (dalar husus	LAH RUP n Paja saha : ((SSF C Devi eh Pe an Usa alan d m hal s.	k PP selaii ') yar sa, 8 mung aha li PPh asal : an re pelal	Ph Pen	Pasal ertam dahar Pajal stri/E sal 22 Khus penju naan	22 (Inina) projet rawa k set Ekspo 2 (Kh sus u ualar ibatn aya i	(Kh). eh i bar orti hus unt n (() ing)	Badanyak ir Te sus u uk B dalan tem	s untir a an Te :: rtentu untuk sadar m ha nasu	uk E Laurente Laurent	Ban Pentu Ditje adar sah ank	was been been been been been been been bee	Bara Ditur I lem I dan na Inc stri/E	Bei ing nju nba Ci du Eks	ndal) set k da ar ukai stri/l spor	harav banya an Pe i). Impor	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada htu c	an U	lem Saha Ditjen Bea	Bea dan C	itun in P dan cuka	juk da ertam Cuka ii).
Terbilang: S 7) Coret yang tidak AGIAN C. LAN 1. Daftar Pertan 2. Surat S (Khusu 3. SSP ya (Khusu 4. X Daftar 5. X Bukti P 6. X Bukti P 6. X Bukti P 6. X Surat K AGIAN D. PERI engan menyad etentuan perunaritahukan di at	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran Jus untuk ang dise Jus untuk Bukti Pe Jus untuk B	JUM UTA etorar dan U Pajak Bank ttor old Bada emung (dalar husus	LAH RUP n Paja saha : ((SSF C Devi eh Pe an Usa gutan DPh Pi alan d m hal s. AN TA an ya akan ya mpira PINAI	IAH k PP selaii sa, B pPh asal ; an re pelal NNDA	Ph Pin Pering dispersion of the Pering dispers	Pasal ertam diseto dahar Pajal sstri/E ssal 22 Khus penju naan	22 (Inina) pr ole rawa k set Ekspo 22 (Kr sus u ualar ibatn aya i ra ad	(Kh). eh i barriorti hus unti n (d ing)	impo Bada nyak ir Te sus t uk B dala item anyat henyat	s untir a an Te :: rtenti untuk adar m ha	uk E Laurente Laurent	Ban Pentu Ditje adar sah ank	was been been been been been been been bee	Bara Ditur I lem I dan na Inc stri/E	Bei ing nju nba Ci du Eks	ndal) set k da ar ukai stri/l spor	harav banya an Pe i). Impor	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada htu c	an U	lem Saha Ditjen Bea	Bea dan C	itun in P dan cuka	juk da ertam Cuka ii).
Terbilang: S Te	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran Jus untuk ang dise Jus untuk Bukti Pe Pemungu rincian p In lelang Kuasa Kh NYATAA Bari sepe dang-untas bese	JUMI UTA etorari Jan U Pajak Bank tor ole Bada emung (dalari (dalari husus AN DA C/PIM L A	n Pajassaha i (SSF) (SSF	IAH k PP selaii sa, B munq aha li PPh asal ; an re pelal NNDA	Ph Pin Penng di Bendu Passe 22 (la transportation di Passe 22	Pasal ertam diseto dahar Pajal stri/E sal 22 Khus penju naan	22 (Inina) or ole rawa k set Ekspo 2 (Kh sus u ualar lelai	(Kh). eh i barrorti hus unt n (c ing)	impo Bada nyak ir Te sus t uk B dala item anyat henyat	s untir a an Te :: rtentu untuk sadar m ha nasu	uk E Laurente Laurent	Ban Pentu Ditje adar sah ank	was been been been been been been been bee	Bara Ditur I lem I dan na Inc stri/E	Bei ing nju nba Ci du Eks	ndal) set k da ar ukai stri/l spor	harav banya an Pe i). Impor	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada htu c	an U	lem Saha Ditjen Bea	Bea dan C	dan Cuka	juk da ertam Cuka ai).
Terbilang: S Te	ATU JII APIRAN Surat Senina/Bad Setoran las untuk ang dise suntuk Bukti Pe emungu rincian pe a lelang d Kuasa Ki NYATAA lari sepe dang-un tas bese PAJAK A J	JUMI UTA etorari Jan U Pajak Bank tor ole Bada emung (dalari (dalari husus AN DA C/PIM L A	n Paja saha : ((SSF c Devi eh Pe an Usa gutan Ph Pa alan d m hal s.	IAH k PP selaii sa, B munq aha li PPh asal ; an re pelal NNDA	Ph Pin Pering dispersion of the Pering dispers	Pasal ertam diseto dahar Pajal stri/E sal 22 Khus penju naan	22 (Inina) pr ole rawa k set Ekspo 22 (Kr sus u ualar ibatn aya i ra ad	(Kh). eh i barrorti hus unt n (c ing)	impo Bada nyak ir Te sus t uk B dala item anyat henyat	s untir aan Te :: rrtentr untuk adar m ha nasuu takar anar, AJIB	uk E Laurente Laurent	Ban I Pe Intu Ditje adar sahi ank ank ank ank	was isi-san ya apa dari K	Bara Ditur Iem dan na Ind sstri/E ksi sa yang	Being nju nba Ci du Eks etu	ndal j set ik da ar ukai stri// spor ur).	harav banya nan Pe i). Impor tir Te	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Bada htu c	an U	lem Saha Ditjen Bea	Bea dan C	dan Cuka	juk da ertam Cuka ii).
Terbilang: S 7 Coret yang tidak AGIAN C. LAN 1. Daftar Pertan 2. Surat S (Khusu 4. X Daftar 5. X Bukti P 6. Daftar 7. Risalah 8. Surat K AGIAN D. PERI Pengan menyad etentuan peruni eritahukan di at	ATU JU APIRAN Surat Senina/Bad Setoran Jus untuk ang dise ang untuk ang unt	JUMI UTA etorari Jan U Pajak Bank tor ole Bada emung (dalari (dalari husus AN DA C/PIM L A	n Pajassaha i (SSF) (SSF	IAH k PP selaii sa, B munq aha li PPh asal ; an re pelal NNDA	Ph Pin Penng di Bendu Passe 22 (la transportation di Passe 22	Pasal Pertam diseto dahar Pajal stri/E Khus penju naan VNGA a aki ku, si annya	22 (Inina) or ole rawa k set Ekspo 2 (Kh sus u ualar lelai	(Kh). eh i barri hus unt n (c ing)	impo Bada nyak ir Te sus u Uuk B dalai term anyat henyat	s untir ortir a aan Te :: rtentu untuk aadar m ha nasul takar enar, AJIB	k sa len	Ban Pentu Ditje dark	was been been been been been been been bee	Bara Ditur Iem dan na Ind sstri/E ksi sa yang	Being nju nba Ci du ks etu	ndal j setik da ar ukai stri/l sspor ur).	harav banya an Pe i). Impoi	war ak: erta	n/Ba	ada na/E	Badantu c	an U	lem Saha Ditjen Bea	Bea dan College	dan Cuka	juk da ertam Cuka ai).

Sumber:

1. Siti Resmi, 2019. Perpajakan 1 Teori dan Kasus. Edisi 11. Penerbit : Salemba Empat.